

# ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI SEKTOR-SEKTOR PEMBENTUK PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DI KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL PADA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2019

*Analysis of Growth Rate and Contribution of Gross Regional Domestic  
Products Forming Sectors (GRDP) in Under-Developed Municipality District  
in Nusa Tenggara Timur Province 2017-2019*

Slamet Widodo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

email: slamet.widodo@dpr.go.id

---

## **Abstract**

*Development of underdeveloped areas is the government's priority development agenda contained in National Long Term Development Planning (RPJMN). In the 2015-2019 RPJMN, the government has eradicated 60 underdeveloped districts and in the 2020-2024 RPJMN the target of 35 underdeveloped regions can be achieved by 2024. In the 2020-2024 RPJMN period, the government sets 62 underdeveloped districts as stated in Presidential Regulation No. 63 of 2020 concerning the Determination of Disadvantaged Regions for 2020-2024. This study discusses the growth rate and contribution of sectors forming Gross Regional Domestic Product (GRDP) in underdeveloped districts in East Nusa Tenggara Province for the period 2017-2019. The data used is GRDP data for the period 2016-2019. The data processing uses Klassen typology, Location Quotient (LQ), Growth Ratio Model and Overlay Analysis to determine sectors that receive development priorities. The results showed that the agriculture, forestry, and fishery sectors; real estate sector; government administration sector, defense, compulsory social security; and the construction sector is the leading sector. Meanwhile, the construction sector, electricity and gas supply, water supply, waste management, waste and recycling, mining and quarrying, and corporate services are potential sectors in several districts.*

**Keywords:** *Growth Rate of GRDP, Underdeveloped Region, Klassen Typology, Location Quotient (LQ)*

---

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Daerah tertinggal menjadi prioritas pemerintah dalam pembangunan jangka menengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, pemerintah telah menetapkan sebanyak 122 kabupaten daerah tertinggal. Berbagai kebijakan afirmatif yang berpihak pada daerah tertinggal, baik melalui transfer ke daerah maupun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, menjadi bagian dari kebijakan pembangunan nasional dan terus dievaluasi target capaiannya dalam setiap jangka menengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024, pemerintah menetapkan 62 kabupaten daerah tertinggal yang menjadi fokus dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,92 persen dan Persentase Penduduk Miskin (PPM) sebesar 9,14 persen menjadi 2 (dua) indikator acuan dalam menetapkan 62 kabupaten daerah tertinggal dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Sejumlah 62 kabupaten daerah tertinggal ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu 7 kabupaten di Wilayah Sumatera, 14 kabupaten di Wilayah Nusa Tenggara, 3 kabupaten di Wilayah Sulawesi, 8 kabupaten di Wilayah Maluku, dan 30 kabupaten di Wilayah Papua.

Data BPS dalam kurun waktu 2016-2019 menunjukkan bahwa PPM dan IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Sepanjang tahun 2016-2019, persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 21,62 persen, berada jauh di atas angka nasional. Sementara itu, nilai IPM Provinsi NTT juga berada di bawah rata-rata nasional yaitu sebesar 64,12 dalam periode tahun 2016-2019. Nilai rata-rata IPM Indonesia sepanjang tahun 2016-2019 sebesar 71,07.

Kinerja kedua indikator tersebut di atas, yang mengategorikan sebagian besar kabupaten di provinsi NTT sebagai daerah tertinggal, tentunya tidak lepas dari kinerja pertumbuhan ekonomi di kabupaten yang bersangkutan. Indikator kinerja yang dimaksud adalah laju pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita. Data BPS menunjukkan bahwa secara rata-rata laju pertumbuhan ekonomi kabupaten daerah tertinggal di Provinsi NTT sebesar 5,14 persen di tahun 2017 dan 5,10 persen di tahun 2019, berada di atas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT yang sebesar 5,03 persen di tahun 2017 dan 5,24 persen di tahun 2019. PDRB per kapita di kabupaten daerah tertinggal sebesar Rp14,37 juta di tahun 2017 dan Rp16,31 juta di tahun 2019, berada di bawah PDRB per kapita di Provinsi NTT yang sebesar Rp16,83 juta di tahun 2017 dan Rp19,60 juta di tahun 2019.

PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2017 masih didominasi oleh Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan kontribusi sebesar 23 persen. Kota Kupang juga menjadi satu-satunya daerah yang daerah yang paling maju di wilayah NTT dengan pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 sebesar 6,83 persen dan PDRB per kapita mencapai Rp49,84 juta. Struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Kemampuan daerah untuk maju tentunya tergantung dari bagaimana pemerintah daerah mampu mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sektor-sektor unggulan yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah namun juga berorientasi ekspor (sektor basis), dan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan sektor-sektor tersebut sebagai sektor unggulan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Mengacu dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah klasifikasi sektor perekonomian di kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
2. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan nonbasis dalam perekonomian di kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur?
3. Sektor-sektor apakah yang layak mendapatkan prioritas dalam pembangunan daerah di kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur?

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka ditetapkan tujuan penelitian, yaitu :

1. Mengetahui tipologi (klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi) masing-masing kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Mengetahui sektor basis dan nonbasis di masing-masing kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Menentukan sektor unggulan perekonomian sebagai strategi kebijakan terkait dengan arah dan pelaksanaan pembangunan di masing-masing daerah, serta merekomendasikan sektor yang berpotensi berkembang di masa yang akan datang pada masing-masing kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Teori/Definisi**

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan kriteria daerah tertinggal yang mencakup aspek-aspek yaitu: (i) perekonomian masyarakat; (ii) sumber daya manusia; (iii) sarana dan prasarana; (iv) kemampuan keuangan daerah; (v) aksesibilitas; dan (vi) karakteristik daerah. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) bertujuan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan antara daerah dalam menjamin terwujudnya persatuan dan keadilan pembangunan nasional, mempercepat terpenuhinya kebutuhan dasar serta sarana dan prasarana daerah tertinggal, dan meningkatkan koordinasi integrasi dan sinkronisasi pusat-daerah dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang menjamin terselenggarakan PPDT.

Pertumbuhan ekonomi daerah, yang tercermin melalui PDRB, merupakan salah satu indikator yang mendorong keberhasilan daerah dalam memperbaiki kriterianya. PDRB mencerminkan produktivitas daerah atas barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Laju pertumbuhan PDRB yang positif menunjukkan adanya kenaikan produksi barang dan jasa sekaligus menjadi ukuran tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Melalui konsep pendekatan produksi, PDRB juga menggambarkan tingkat produktivitas 17 (tujuh belas) sektor-sektor pembentuk PDRB. Melalui identifikasi atas sektor-sektor prioritas pembentuk PDRB ini, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mengangkat status daerah dari status ketertinggalannya. Perumusan kebijakan pembangunan daerah dapat dilakukan terhadap sektor-sektor basis dan sektor-sektor nonbasis. Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif yang cukup tinggi, sementara sektor nonbasis adalah sektor-sektor yang kurang potensial, tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis (Sjafizal, hal. 89). Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah juga akan berpengaruh tingkat kemiskinan dan IPM daerah yang merupakan dua indikator yang digunakan pemerintah untuk melakukan pemetaan daerah tertinggal dengan membandingkan nilainya dengan capaian rata-rata secara nasional.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

1. Rajab, Abdul (2019) meneliti tentang bagaimana menentukan sektor-sektor unggulan pada Kabupaten Takalar melalui Tipologi *Klassen*. Penelitian ini menggunakan data *time series* PDRB Kabupaten Takalar dan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013-2017, berdasarkan atas harga konstan 2010 dan atas harga berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor yang masuk kategori potensial berdasarkan atas harga konstan 2010 adalah sektor sektor Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; dan Informasi dan Komunikasi. Sedangkan sektor yang masuk kategori potensial berdasarkan atas harga berlaku adalah sektor Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Informasi dan Komunikasi. Penelitian ini tidak menggunakan alat analisis *Location Quotient (LQ)*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis *Overlay* untuk mengidentifikasi lebih jauh sektor unggulan yang perlu mendapatkan prioritas dan yang tidak mendapatkan prioritas dalam pembangunan.
2. Rahayu (2010) meneliti tentang penerapan aplikasi tipologi *Klassen* pada pengembangan subsektor pertanian tanaman pangan di Kabupaten Boyolali. Penelitian menggunakan data PDRB Kabupaten Boyolali dan Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2004-2008 atas harga berlaku dan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali. Pengolahan data menggunakan perpaduan antara tipologi *Klassen* dengan

metode SWOT hasil wawancara dengan *stakeholder*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Tipologi *Klassen* tidak ada subsektor pertanian yang masuk katagori subsektor prima. Subsektor Tanaman Bahan Makanan masuk dalam kategori subsektor potensial. Penelitian ini juga tidak menggunakan alat analisis *Location Quotient (LQ)*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis *Overlay* untuk mengidentifikasi lebih jauh sektor unggulan yang perlu mendapatkan prioritas dan yang tidak mendapatkan prioritas dalam pembangunan.

3. Tutupoho, Ali (2019) melakukan penelitian tentang sektor basis dan nonbasis di Provinsi Maluku yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian menggunakan metode analisis data panel atas data PDRB berdasarkan harga konstan 2010. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sektor basis memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Maluku. Penelitian ini juga tidak menggunakan alat analisis *Location Quotient (LQ)*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis *Overlay* untuk mengidentifikasi lebih jauh sektor unggulan yang perlu mendapatkan prioritas dan yang tidak mendapatkan prioritas dalam pembangunan.
4. Putra, Edo Pramana (2018) meneliti pengembangan wilayah berbasis potensi sektor unggulan di Kabupaten Gowa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan primer. Data primer diperoleh langsung dengan mengunjungi kondisi lapangan (Kabupaten Gowa) dan data sekunder meliputi: PDRB Kabupaten Gowa Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2009-2013, dan jumlah produksi tanaman pertanian. Analisis data menggunakan tipologi *Klassen* dan *Location Quotient (LQ)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian, sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa menjadi sektor unggulan di Kabupaten Gowa. Penelitian ini juga tidak menggunakan Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis *Overlay* untuk mengidentifikasi lebih jauh sektor unggulan yang perlu mendapatkan prioritas dan yang tidak mendapatkan prioritas dalam pembangunan.

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1. Jenis Penelitian dan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, dan PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur periode tahun 2017-2019. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu data juga bersumber dari berbagai informasi dan referensi sumber

pustaka, media massa, internet, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 3.1. Teknis Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif yang digunakan untuk mempermudah analisis tabel-tabel dan grafik secara sederhana sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan dari objek penelitian. Untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan beberapa metode analisis data, yaitu sebagai berikut.

#### 3.1.1. Analisis Tipologi *Klassen*

Tipologi *Klassen* digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengklasifikasi sektor-sektor ekonomi di daerah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan struktur ekonomi di tingkat provinsi sebagai daerah referensi. Analisis Tipologi *Klassen* menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 2008):

##### 1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developed sector*) (kuadran I)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB ( $si$ ) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi ( $s$ ) dan memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB ( $ski$ ) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi ( $sk$ ). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $si > s$  dan  $ski > sk$ .

##### 2. Sektor maju tetapi tertekan (*stagnant sector*) (kuadran II)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB ( $si$ ) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi ( $s$ ), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB ( $ski$ ) yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi ( $sk$ ). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $si < s$  dan  $ski > sk$ .

##### 3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sector*) (kuadran III)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB ( $si$ ) yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi ( $s$ ), tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB ( $ski$ ) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi ( $sk$ ). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $si > s$  dan  $ski < sk$ .

##### 4. Sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*) (kuadran IV)

Kuadran ini merupakan kuadran yang laju pertumbuhan sektor tertentu dalam PDRB ( $si$ ) yang lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan sektor tersebut dalam PDRB daerah yang menjadi referensi ( $s$ ) dan sekaligus

memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB ( $s_i$ ) yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi ( $s_k$ ). Klasifikasi ini dilambangkan dengan  $s_i < s_k$  dan  $s_i < s_k$ . Klasifikasi sektor PDRB menurut Tipologi *Klassen* sebagaimana tercantum di bawah ini.

**Tabel 1. Klasifikasi Sektor PDRB Menurut Tipologi Klassen**

<b>Kuadran I</b> Sektor yang maju dan tumbuh pesat <i>(developed sector)</i> $s_i > s_k$ dan $s_i > s_k$	<b>Kuadran II</b> Sektor yang maju tetapi tertekan <i>(stagnant sector)</i> $s_i > s_k$ dan $s_i > s_k$
<b>Kuadran III</b> Sektor potensial atau masih dapat berkembang <i>(developing sector)</i> $s_i > s_k$ dan $s_i > s_k$	<b>Kuadran IV</b> Sektor yang relatif tertinggal <i>(underdeveloped sector)</i> $s_i > s_k$ dan $s_i > s_k$

Sumber: Sjafrizal (2008)

### 3.1.2. Analisis *Location Quotient*

Analisis *Location Quotient* (LQ) merupakan cara untuk menentukan sektor maupun subsektor yang menjadi unggulan sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Metode ini membandingkan tentang besarnya peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor tersebut di tingkat nasional atau di tingkat regional. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi potensi internal yang dimiliki daerah tersebut yaitu sektor basis dan sektor nonbasis. Rumusnya adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{S_i/S}{N_i/N}$$

Keterangan:

LQ = Nilai *Location Quotient*

$S_i$  = Nilai tambah sektor  $i$  kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur

$S$  = PDRB kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur

$N_i$  = Nilai tambah sektor  $i$  di Provinsi Nusa Tenggara Timur

$N$  = PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan formulasi tersebut, nilai LQ dikelompokkan sebagai berikut:

1. Nilai  $LQ > 1$ , ini berarti bahwa tingkat spesialisasi suatu sektor di kabupaten daerah tertinggal lebih besar/lebih tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (sektor basis).
2. Nilai  $LQ = 1$ , ini berarti bahwa tingkat spesialisasi suatu sektor di kabupaten daerah tertinggal adalah sama dengan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Nilai  $LQ < 1$ , ini berarti bahwa tingkat spesialisasi suatu sektor di kabupaten daerah tertinggal lebih kecil/lebih rendah dibandingkan sektor yang sama dalam di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (sektor nonbasis).

### 3.1.3. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Menurut Yusuf (1999), analisis Model Rasio Pertumbuhan dilakukan untuk melihat deskripsi sektor ekonomi, terutama struktur ekonomi daerah yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik eksternal (provinsi) maupun internal (kabupaten/kota). Alat analisis ini sebagai alat dalam menentukan sektor unggulan kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menekankan pada kriteria pertumbuhan baik eksternal maupun internal.

Pendekatan MRP dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

### 1. Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)

Nilai RPr diperoleh dengan membandingkan laju pertumbuhan masing-masing sektor di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total sektor wilayah referensi.

$$RPr = \frac{\Delta E_{iR}/E_{iR}}{\Delta ER/ER}$$

Keterangan :

$E_{iR}$  = Perubahan PDRB sektor  $i$  di wilayah referensi pada awal dan akhir tahun penelitian

$ER$  = Perubahan PDRB di wilayah referensi pada awal dan akhir tahun penelitian

$E_{iR}$  = PDRB sektor  $i$  di wilayah referensi pada awal tahun penelitian

$ER$  = PDRB di wilayah referensi pada awal tahun penelitian

Jika  $RPr > 1$ , maka RPr dikatakan (+), berarti laju pertumbuhan sektor  $i$  di wilayah referensi lebih tinggi dari laju pertumbuhan seluruh sektor di wilayah referensi. Demikian juga sebaliknya.

### 2. Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)

Nilai RPs diperoleh dengan membandingkan laju pertumbuhan masing-masing sektor di wilayah studi dengan laju pertumbuhan sektor sejenis di wilayah referensi.

$$RPs = \frac{\Delta E_{iJ}/E_{iJ}}{\Delta E_{iR}/E_{iR}}$$

$E_{iJ}$  = perubahan PDRB sektor  $i$  di wilayah studi pada awal dan akhir tahun penelitian

$E_{iR}$  = perubahan PDRB sektor  $i$  di wilayah referensi pada awal dan akhir tahun penelitian

$E_{iJ}$  = PDRB sektor  $i$  di wilayah studi pada awal tahun penelitian

$E_{iR}$  = PDRB sektor  $i$  di wilayah referensi pada awal tahun penelitian

Jika  $RPs > 1$ , maka RPs dikatakan (+), berarti bahwa laju pertumbuhan sektor  $i$  di wilayah studi lebih besar dari laju pertumbuhan sektor tersebut di wilayah referensi. Demikian juga sebaliknya.

Dari hasil analisis MRP dengan melihat nilai RPr dan RPs akan diklasifikasikan sektor-sektor ekonomi dalam empat klasifikasi, yaitu sebagai berikut.



1. Nilai RPr (-) dan nilai RPs (+), berarti sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi memiliki pertumbuhan kurang menonjol tetapi di tingkat wilayah studi memiliki pertumbuhan yang menonjol.
2. Nilai RPr (+) dan nilai RPs (+), berarti kegiatan sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi dan tingkat wilayah studi memiliki pertumbuhan yang menonjol.
3. Nilai RPr (+) dan nilai RPs (-), berarti sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi memiliki pertumbuhan yang menonjol, tetapi tingkat wilayah studi kurang menonjol.
4. Nilai RPr (-) dan nilai nilai RPs (-), berarti sektor tersebut pada tingkat wilayah referensi maupun di tingkat wilayah studi memiliki pertumbuhan yang tidak menonjol.

#### **3.1.4. Analisis Tipologi Overlay**

Analisis Tipologi *Overlay* merupakan penggabungan lebih dari satu alat analisis dengan tujuan untuk menyaring hasil analisis yang paling baik. Analisis Tipologi *Overlay* dalam penelitian ini merupakan rangkuman antara analisis *Location Quotient (LQ)* dan analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) yaitu nilai RPs. Analisis ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi unggulan maupun potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan (RPs) dan kriteria kontribusi (LQ). Dengan mempertimbangkan kedua kriteria tersebut, penentuan kegiatan ekonomi yang unggul dan potensial dapat lebih akurat. Menurut Yusuf (1999), pengelompokannya adalah sebagai berikut:

1. RPs (+) dan LQ (+), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan layak mendapat prioritas dalam pembangunan.
2. RPs (+) dan LQ (-), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang potensial. Sektor ini sedang mengalami perkembangan yang perlu mendapat perhatian untuk kontribusinya dalam pembentukan PDRB.
3. RPs (-) dan LQ (+), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang potensial namun ada kecenderungan menurun. Sektor ini menunjukkan sedang mengalami penurunan sehingga perlu dipacu pertumbuhannya.
4. RPs (-) dan LQ (-), berarti bahwa sektor tersebut merupakan sektor yang rendah dari segi pertumbuhan dan kontribusi (sektor tertinggal). Sektor ini tidak layak mendapat prioritas dalam pembangunan.

## **4. Hasil dan Pembahasan**

### **4.1. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Analisis Tipologi *Klassen* digunakan untuk mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor perekonomian di masing-masing kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melihat laju pertumbuhan dan nilai kontribusi sektor-sektor ekonomi di masing-masing kabupaten. Hal ini dimaksudkan untuk melihat posisi pertumbuhan masing-masing sektor di tingkat kabupaten daerah tertinggal terhadap sektor sejenis di tingkat provinsi dan

menentukan posisinya pada salah satu kuadran klasifikasi. Berdasarkan analisis tipologi *Klassen*, laju pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor di kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Kabupaten/Kota Daerah Tertinggal dan Provinsi NTT Tahun 2018<sup>1</sup>**

Lap. Usaha	NTT		Kab. Sumba Barat		Kab. Sumba Timur		Kab. Kupang		Kab. Timor Tgh Sel		Kab. Belu		Kab. Alor	
	s	sk	si	ski	si	ski	si	ski	si	ski	si	ski	si	ski
A	2.94	28.34	7.32	26.09	7.91	23.48	10.50	40.32	8.11	44.24	8.29	22.87	8.96	30.51
B	2.02	1.22	5.51	1.18	2.40	1.30	3.66	2.15	2.27	1.97	-1.23	3.37	3.41	1.61
C	5.13	1.27	7.35	1.73	7.57	1.27	10.50	1.93	10.00	0.70	9.52	1.11	7.11	1.45
D	10.64	0.08	16.52	0.06	13.21	0.05	11.48	0.03	12.74	0.04	16.52	0.06	12.21	0.10
E	4.88	0.05	6.25	0.00	2.83	0.03	-0.48	0.04	5.60	0.02	8.99	0.02	5.16	0.10
F	6.39	10.86	10.75	6.86	8.73	12.93	10.35	12.77	13.00	8.25	10.86	7.71	9.65	10.11
G	7.32	11.14	11.74	17.46	9.21	15.51	9.48	14.26	9.98	6.93	10.69	11.76	10.64	12.55
H	7.92	5.52	9.10	2.26	7.50	4.58	8.46	6.09	7.49	1.62	7.63	4.94	8.76	5.72
I	12.30	0.77	15.87	0.41	14.37	0.26	7.46	0.15	10.88	0.10	14.41	0.39	8.45	0.43
J	4.89	6.64	2.50	6.22	5.80	4.74	5.97	5.11	7.50	8.48	7.05	4.78	5.17	7.05
K	3.48	4.12	8.74	5.39	9.58	3.15	6.11	0.74	6.74	3.08	7.22	6.06	6.30	6.40
L	4.87	2.50	6.96	2.59	6.24	1.76	5.99	1.66	6.69	3.02	7.02	2.90	6.90	1.93
M,N	1.74	0.30	5.47	0.19	8.64	0.25	6.12	0.04	7.41	0.08	6.90	0.07	4.32	0.61
O	7.56	13.38	11.62	17.10	9.01	11.57	7.33	10.21	14.40	13.47	13.33	12.87	11.89	17.09
P	2.41	9.54	8.75	8.97	9.53	13.43	8.08	3.48	11.69	5.62	11.12	15.50	7.82	3.09
Q	7.09	2.17	11.40	1.50	8.08	2.00	10.43	0.83	8.37	1.44	11.96	2.35	7.91	0.65
R,S,T,U	6.46	2.12	5.95	1.98	4.30	3.68	8.90	0.16	2.51	0.95	9.24	3.25	6.07	0.61

Lap. Usaha	NTT		Kab. Lembata		Kab. Rote Ndao		Kab. Sumba Tengah		Kab. Sumba Barat Dy		Kab. Manggarai Timur		Kab. Sabu Raijua		Kab. Malaka	
	s	sk	si	ski	si	ski	si	ski	si	ski	si	ski	si	ski	si	ski
A	2.94	28.34	8.50	33.32	9.91	46.73	8.10	39.24	5.29	41.62	8.30	43.70	9.20	44.15	7.68	40.36
B	2.02	1.22	5.56	0.50	4.73	0.80	6.32	3.78	5.71	0.91	-8.15	4.46	6.04	0.39	7.13	1.11
C	5.13	1.27	7.65	0.21	7.44	1.28	8.42	0.58	6.87	0.63	9.62	0.51	11.33	1.37	9.32	1.72
D	10.64	0.08	16.67	0.09	10.26	0.06	0.00	0.00	19.42	0.03	16.36	0.03	13.04	0.02	16.47	0.04
E	4.88	0.05	5.45	0.04	5.22	0.11	0.00	0.01	4.76	0.01	8.33	0.00	0.00	0.01	7.41	0.01
F	6.39	10.86	12.23	6.86	6.65	5.61	13.60	3.52	12.77	4.60	11.62	5.33	10.35	14.05	8.89	11.47
G	7.32	11.14	10.96	6.74	6.87	8.01	12.54	4.59	12.05	11.67	11.74	11.62	10.42	16.31	10.58	3.95
H	7.92	5.52	7.14	2.99	10.28	3.20	6.54	0.53	17.21	2.54	8.60	0.73	10.81	4.15	6.74	6.58
I	12.30	0.77	12.94	0.24	15.86	0.18	11.93	0.11	16.78	0.04	12.46	0.11	15.94	0.74	11.20	0.11
J	4.89	6.64	5.56	8.50	7.90	5.29	3.16	7.73	7.07	11.47	7.48	12.17	6.84	0.87	6.61	6.78
K	3.48	4.12	6.97	0.41	5.70	0.78	5.89	1.43	6.85	2.09	8.31	0.45	8.85	0.13	5.25	1.34
L	4.87	2.50	7.09	1.64	6.06	1.12	8.80	2.85	5.44	2.11	7.39	1.50	5.30	4.82	6.69	2.88
M,N	1.74	0.30	5.36	0.07	4.86	0.09	15.38	0.01	4.17	0.01	0.00	0.00	7.41	0.02	5.94	0.04
O	7.56	13.38	9.68	28.85	11.89	13.71	13.75	26.56	12.94	13.20	13.65	14.09	11.31	11.18	13.07	14.46
P	2.41	9.54	4.71	6.90	9.61	9.51	6.27	8.35	11.01	6.42	11.37	2.52	5.95	0.33	11.05	5.13
Q	7.09	2.17	8.97	1.53	6.72	3.42	13.16	0.42	10.24	1.83	10.65	2.47	5.35	1.27	12.12	1.26
R,S,T,U	6.46	2.12	6.78	1.13	7.92	0.11	6.10	0.29	4.64	0.81	5.99	0.31	9.55	0.16	9.41	2.75

Sumber: BPS (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, maka klasifikasi sektor PDRB pada masing-masing kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun tertentu dapat dikelompokkan dalam empat kuadran, sebagai berikut.

**1. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Sumba Barat**

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB kabupaten Sumba Barat tahun 2018 menunjukkan bahwa ada lima sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor (i) Industri Pengolahan; (ii) Perdagangan Besar dan Eceran; (iii) Jasa Keuangan dan Asuransi; (iv) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan (v) *Real Estate*. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor (i) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (ii) Pertambangan dan Penggalian;

<sup>1</sup> Keterangan: A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; F. Konstruksi; G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. *Real Estate*; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; R,S,T,U. Jasa lainnya.

Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Adapun sektor yang tertinggal adalah Informasi dan Komunikasi dan sektor Jasa Lainnya.

## **2. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Sumba Timur**

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB kabupaten Sumba Timur tahun 2018 menunjukkan bahwa ada lima sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor (i) Pertambangan dan Penggalian; (ii) Industri Pengolahan; (iii) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (iv) Jasa Pendidikan; dan (v) Konstruksi. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor Jasa Lainnya berada dalam kuadran II menjadi sektor yang maju tapi tertekan (sektor stagnan). Adapun sektor yang tertinggal adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Transportasi dan Pergudangan.

## **3. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kupang**

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB Kabupaten Kupang tahun 2018 menunjukkan bahwa ada enam sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi dan Pergudangan. Sektor potensial yang masuk dalam kuadran III ditempati oleh Pengadaan Listrik dan Gas; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Sementara sektor yang tertinggal Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

## **4. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan**

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2018 menunjukkan bahwa ada lima sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Informasi dan Komunikasi; *Real Estate*; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan

Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Adapun sektor yang tertinggal adalah Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Lainnya.

#### 5. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Belu

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB Kabupaten Belu tahun 2018 menunjukkan bahwa ada enam sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sektor Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor tertinggal di kuadran IV, dan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor stagnan di kuadran II.

#### 6. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Alor

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB Kabupaten Alor tahun 2018 menunjukkan bahwa ada sebelas sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Konstruksi; *Real Estate*; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Adapun sektor yang tertinggal adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Lainnya.

#### 7. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Lembata

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB Kabupaten Lembata tahun 2018 menunjukkan bahwa ada empat sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Informasi dan Komunikasi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan

Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya. Adapun sektor yang tertinggal adalah Transportasi dan Pergudangan.

#### **8. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Rote Ndao**

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB Kabupaten Rote Ndao Barat tahun 2018 menunjukkan bahwa ada empat sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Pertambangan dan Penggalian; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya. Sektor yang stagnan pada kuadran II dialami oleh sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sementara sektor yang tertinggal pada kuadran IV dialami oleh sektor Pengadaan Listrik dan Gas; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

#### **9. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Sumba Tengah**

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB kabupaten Sumba Barat tahun 2018 menunjukkan bahwa ada empat sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; *Real Estate*; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor yang tertinggal (kuadran IV) adalah Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Jasa Lainnya. Sementara sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor stagnan (kuadran II).

#### **10. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya**

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018 menunjukkan bahwa ada tiga sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Informasi dan Komunikasi. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Pertambangan dan Penggalian; Industri

Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Asuransi; *Real Estate*; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Adapun sektor yang tertinggal (kuadran IV) adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Jasa Lainnya.

#### 11. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Manggarai Timur

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB kabupaten Sumba Barat tahun 2018 menunjukkan bahwa ada lima sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor yang maju namun tertekan (sektor stagnan pada kuadran II) adalah sektor Pertambangan dan Penggalian. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan Dan Asuransi; *Real Estate*; dan Jasa Pendidikan. Adapun sektor yang tertinggal (kuadran IV) adalah Jasa Perusahaan; dan Jasa Lainnya.

#### 12. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Sabu Raijua

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB Kabupaten Sabu Raijua Barat tahun 2018 menunjukkan bahwa ada lima sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan *Real Estate*. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; dan Jasa Lainnya. Adapun sektor yang tertinggal adalah Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

#### 13. Laju pertumbuhan dan kontribusi sektor PDRB Kabupaten Malaka

Dari hasil analisis Tipologi *Klassen* terhadap PDRB Kabupaten Malaka tahun 2018 menunjukkan bahwa ada lima sektor yang menempati sektor maju dan tumbuh pesat (kuadran I) yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; *Real Estate*; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Lainnya. Sektor yang mengalami stagnan (kuadran II) adalah

Transportasi dan Pergudangan. Sedangkan sektor potensial (kuadran III) ditempati oleh sektor Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Adapun sektor yang tertinggal adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Secara rata-rata klasifikasi masing-masing sektor PDRB pada kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2019 dalam pengelompokan kuadran adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Rata-Rata Klasifikasi Sektor PDRB Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi NTT Berdasarkan Tipologi Klassen Tahun 2017–2019**

Lap. Usaha	Kab. Sumba Barat	Kab. Sumba Timur	Kab. Kupang	Kab. Timor Tgh Sel	Kab. Belu	Kab. Alor	Kab. Lembata	Kab. Rote Ndao	Kab. Sumba Tengah	Kab. Sumba Barat Daya	Kab. Manggarai Timur	Kab. Sabu Raijua	Kab. Malaka
A	III	III	I	I	III	I	I	I	I	I	I	I	I
B	III	I	I	I	II	I	III	III	I	III	II	III	III
C	I	I	II	III	III	I	III	I	III	III	III	I	I
D	III	III	III	III	III	I	I	III	III	III	III	III	III
E	III	IV	IV	III	III	I	III	I	III	IV	III	III	III
F	III	I	I	III	III	III	III	III	III	III	III	I	I
G	I	I	I	III	I	I	III	III	III	I	I	I	III
H	III	IV	I	III	III	I	IV	III	III	III	III	III	I
I	III	III	IV	IV	III	IV	III	IV	IV	III	III	III	IV
J	IV	III	III	I	III	I	I	III	II	I	I	III	I
K	I	III	III	III	I	III	III	III	III	III	III	III	III
L	I	III	III	I	I	III	III	III	I	III	III	I	I
M,N	III	III	III	III	III	I	III	III	III	III	IV	III	III
O	I	III	IV	I	III	I	I	I	I	III	I	III	I
P	III	I	III	III	I	III	III	III	III	III	III	III	III
Q	III	III	III	III	I	III	III	III	III	III	I	III	III
R,S,T,U	IV	II	III	IV	I	IV	III	III	III	IV	III	III	I

Sumber: BPS (diolah)

#### 4.2. Sektor Basis dan Nonbasis dalam Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan untuk mengetahui sektor-sektor ekonomi yang termasuk ke dalam sektor basis (berpotensi ekspor) dan sektor nonbasis. Apabila hasil perhitungannya menunjukkan angka lebih dari satu ( $LQ > 1$ ) berarti sektor tersebut merupakan sektor basis. Sebaliknya apabila hasilnya menunjukkan angka kurang dari satu ( $LQ < 1$ ) berarti sektor tersebut bukan sektor basis.

Berdasarkan hasil perhitungan LQ untuk menentukan sektor basis dan nonbasis, diperoleh bahwa tujuh kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki lebih dari enam sektor basis. Kabupaten Alor dan Kabupaten Belu menjadi kabupaten yang memiliki sektor basis terbanyak, yaitu masing-masing sembilan dan delapan sektor basis dari 17 sektor atau lapangan usaha pembentuk PDRB. Adapun rekapitulasi hasil rata-rata perhitungan LQ kabupaten daerah tertinggal di Provinsi NTT dalam periode 2017-2019 terlihat dari tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Rata-Rata Perhitungan LQ Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi NTT dalam Periode 2017-2019**

Lap. Usaha	Kab. Rote Ndao		Kab. Sumba Tengah		Kab. Sumba Barat Dy		Kab. Manggarai Timur		Kab. Sabu Raijua		Kab. Malaka	
	LQ	Ket.	LQ	Ket.	LQ	Ket.	LQ	Ket.	LQ	Ket.	LQ	Ket.
A	1,72	Basis	1,42	Basis	1,50	Basis	1,59	Basis	1,62	Basis	1,48	Basis
B	0,57	Non Basis	2,74	Basis	0,66	Non Basis	2,89	Basis	0,28	Non Basis	0,81	Non Basis
C	0,99	Non Basis	0,45	Non Basis	0,49	Non Basis	0,40	Non Basis	1,07	Basis	1,33	Basis
D	0,79	Non Basis	0,06	Non Basis	0,48	Non Basis	0,36	Non Basis	0,30	Non Basis	0,49	Non Basis
E	0,00	Non Basis	0,00	Non Basis	0,00	Non Basis	0,00	Non Basis	0,00	Non Basis	0,00	Non Basis
F	0,51	Non Basis	0,33	Non Basis	0,43	Non Basis	0,50	Non Basis	1,30	Basis	1,06	Basis
G	0,68	Non Basis	0,40	Non Basis	1,01	Basis	1,01	Basis	1,39	Basis	0,34	Non Basis
H	0,61	Non Basis	0,10	Non Basis	0,50	Non Basis	0,14	Non Basis	0,79	Non Basis	1,24	Basis
I	0,25	Non Basis	0,16	Non Basis	0,06	Non Basis	0,15	Non Basis	1,09	Basis	0,15	Non Basis
J	0,60	Non Basis	0,85	Non Basis	1,31	Basis	1,40	Basis	0,10	Non Basis	0,76	Non Basis
K	0,19	Non Basis	0,35	Non Basis	0,52	Non Basis	0,11	Non Basis	0,03	Non Basis	0,33	Non Basis
L	0,45	Non Basis	1,15	Basis	0,84	Non Basis	0,60	Non Basis	1,89	Basis	1,15	Basis
M,N	0,31	Non Basis	0,05	Non Basis	0,03	Non Basis	0,00	Non Basis	0,08	Non Basis	0,15	Non Basis
O	1,09	Basis	2,12	Basis	1,07	Basis	1,13	Basis	0,87	Non Basis	1,14	Basis
P	1,12	Basis	0,95	Non Basis	0,75	Non Basis	0,30	Non Basis	0,04	Non Basis	0,60	Non Basis
Q	1,52	Basis	0,19	Non Basis	0,83	Non Basis	1,12	Basis	0,56	Non Basis	0,58	Non Basis
R,S,T,U	0,05	Non Basis	0,13	Non Basis	0,37	Non Basis	0,14	Non Basis	0,08	Non Basis	1,28	Basis

Lap. Usaha	Kab. Sumba Barat		Kab. Sumba Timur		Kab. Kupang		Kab. Timor Tgh Sel		Kab. Belu		Kab. Alor		Kab. Lembata	
	LQ	Ket.	LQ	Ket.	LQ	Ket.	LQ	Ket.	LQ	Ket.	LQ	Ket.	LQ	Ket.
A	0,94	Non Basis	0,85	Non Basis	1,47	Basis	1,61	Basis	0,83	Non Basis	1,12	Basis	1,22	Basis
B	0,85	Non Basis	0,92	Non Basis	1,58	Basis	1,39	Basis	2,25	Basis	1,13	Basis	0,36	Non Basis
C	1,34	Basis	0,97	Non Basis	1,49	Basis	0,54	Non Basis	0,85	Non Basis	1,11	Basis	0,17	Non Basis
D	0,85	Non Basis	0,72	Non Basis	0,39	Non Basis	0,51	Non Basis	0,83	Non Basis	1,36	Basis	1,26	Basis
E	0,15	Non Basis	0,00	Non Basis	0,00	Non Basis	0,00	Non Basis	0,00	Non Basis	0,00	Non Basis	0,00	Non Basis
F	0,63	Non Basis	1,20	Basis	1,20	Basis	0,77	Non Basis	0,71	Non Basis	0,93	Non Basis	0,64	Non Basis
G	1,51	Basis	1,34	Basis	1,22	Basis	0,60	Non Basis	1,01	Basis	1,08	Basis	0,58	Non Basis
H	0,43	Non Basis	0,87	Non Basis	1,15	Basis	0,31	Non Basis	0,94	Non Basis	1,09	Basis	0,57	Non Basis
I	0,60	Non Basis	0,39	Non Basis	0,21	Non Basis	0,13	Non Basis	0,56	Non Basis	0,59	Non Basis	0,35	Non Basis
J	0,69	Non Basis	0,54	Non Basis	0,58	Non Basis	0,97	Non Basis	0,54	Non Basis	0,80	Non Basis	0,96	Non Basis
K	1,36	Basis	0,81	Non Basis	0,18	Non Basis	0,76	Non Basis	1,51	Basis	1,59	Basis	0,10	Non Basis
L	1,03	Basis	0,70	Non Basis	0,66	Non Basis	1,20	Basis	1,15	Basis	0,77	Non Basis	0,65	Non Basis
M,N	0,70	Non Basis	0,92	Non Basis	0,17	Non Basis	0,30	Non Basis	0,25	Non Basis	2,23	Basis	0,25	Non Basis
O	1,35	Basis	0,91	Non Basis	0,79	Non Basis	1,08	Basis	1,02	Basis	1,35	Basis	2,25	Basis
P	1,03	Basis	1,57	Basis	0,40	Non Basis	0,66	Non Basis	1,82	Basis	0,35	Non Basis	0,79	Non Basis
Q	0,69	Non Basis	0,90	Non Basis	0,38	Non Basis	0,64	Non Basis	1,08	Basis	0,29	Non Basis	0,68	Non Basis
R,S,T,U	0,91	Non Basis	1,63	Basis	0,08	Non Basis	0,42	Non Basis	1,52	Basis	0,28	Non Basis	0,52	Non Basis

Sumber: BPS (diolah)

Tabel di atas juga menggambarkan bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran menjadi sektor basis di sebagian besar kabupaten daerah tertinggal. Nilai LQ terbesar untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu 1,72 berada di Kabupaten Rote Ndao, dan nilai LQ terbesar untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran yaitu 1,51 berada di Kabupaten Sumba Barat. Berikut urutan terbesar sektor lapangan usaha pembentuk PDRB yang menjadi sektor basis di kabupaten daerah tertinggal di Provinsi NTT.

#### 4.3. Sektor Unggulan dan Sektor Potensial dalam Perekonomian Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Analisis MRP merupakan alat analisis untuk melihat deskripsi kegiatan atau sektor ekonomi yang potensial berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah. Analisis ini menyajikan dua jenis rasio pertumbuhan yaitu Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPs) yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Malaka.



**Tabel 5. Hasil Perhitungan Analisis MRP Kabupaten Daerah Tertinggal di Provinsi NTT Tahun 2017-2019**

Lap. Usaha	NTT		Kab. Sumba Barat		Kab. Sumba Timur		Kab. Kupang		Kab. Timor Tgh Sel		Kab. Belu		Kab. Alor		Kab. Lembata	
	RPr	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda
A	0,63	-	0,94	-	1,03	+	1,13	+	1,06	+	1,30	+	1,31	+	1,20	+
B	0,51	-	1,91	+	0,85	-	3,51	+	1,00	-	-0,92	-	0,87	-	1,41	+
C	1,39	+	0,99	-	0,58	-	0,61	-	0,58	-	0,65	-	0,65	-	0,84	-
D	1	-	1,26	+	1,01	+	0,87	-	0,97	-	1,26	+	0,85	-	1,34	+
E	0,92	-	1,71	+	0,22	-	-0,16	-	0,86	-	1,08	+	0,97	-	1,03	+
F	1,05	+	1,10	+	1,28	+	1,67	+	1,41	+	1,18	+	1,06	+	1,30	+
G	1,46	+	0,97	-	0,94	-	0,89	-	0,92	-	0,97	-	0,89	-	0,96	-
H	1,09	+	1,03	+	0,90	-	0,85	-	0,73	-	1,00	-	1,04	+	0,92	-
I	1,78	+	1,36	+	1,37	+	0,54	-	0,53	-	1,07	+	0,71	-	1,04	+
J	1,01	+	0,45	-	0,90	-	0,81	-	1,17	+	0,87	-	0,90	-	0,95	-
K	0,64	-	1,25	+	1,54	+	0,91	-	0,71	-	0,88	-	0,69	-	0,88	-
L	0,46	-	1,03	+	0,99	-	0,81	-	1,04	+	1,05	+	1,13	+	1,22	+
M,N	0,55	-	0,89	-	1,64	+	1,76	+	1,74	+	1,72	+	0,76	-	0,72	-
O	1,54	+	0,94	-	0,79	-	0,57	-	1,17	+	1,03	+	0,87	-	0,73	-
P	0,82	-	0,80	-	1,18	+	0,80	-	1,19	+	1,35	+	0,62	-	0,86	-
Q	1,24	+	1,07	+	0,88	-	1,02	+	0,69	-	1,34	+	0,68	-	0,81	-
R,S,T,U	1,27	+	0,72	-	0,27	-	1,02	+	-	-	1,21	+	0,77	-	0,91	-

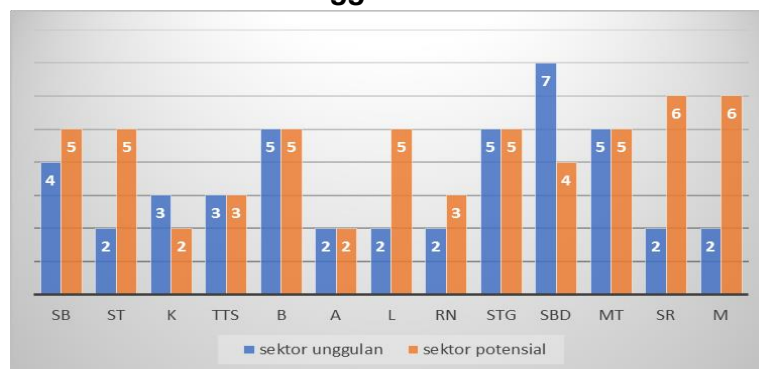
Lap. Usaha	NTT		Kab. Rote Ndao		Kab. Sumba Tengah		Kab. Sumba Barat Dy		Kab. Manggarai Timur		Kab. Sabu Raijua		Kab. Malaka	
	RPr	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda	RPs	Tanda
A	0,63	-	1,42	+	1,03	+	0,73	-	1,12	+	1,39	+	1,24	+
B	0,51	-	1,42	+	2,13	+	2,02	+	-2,15	-	2,33	+	1,91	+
C	1,39	+	0,78	-	1,05	+	0,95	-	0,95	-	0,78	-	0,69	-
D	1	-	0,81	-	0,00	-	1,55	+	1,37	+	1,18	+	1,23	+
E	0,92	-	0,76	-	1,71	+	0,60	-	1,14	+	1,03	+	1,28	+
F	1,05	+	0,80	-	1,41	+	1,28	+	1,27	+	1,09	+	1,01	+
G	1,46	+	0,74	-	1,09	+	1,03	+	1,03	+	0,85	-	0,87	-
H	1,09	+	1,01	+	0,99	-	1,41	+	0,75	-	0,89	-	0,82	-
I	1,78	+	0,78	-	0,96	-	1,34	+	0,70	-	1,32	+	0,76	-
J	1,01	+	1,12	+	0,41	-	1,01	+	1,18	+	0,77	-	0,89	-
K	0,64	-	0,84	-	0,44	-	0,69	-	0,07	-	2,20	+	0,48	-
L	0,46	-	1,27	+	1,55	+	0,93	-	1,26	+	0,56	-	1,19	+
M,N	0,55	-	0,46	-	1,91	+	1,08	+	0,00	-	0,00	-	0,00	-
O	1,54	+	0,98	-	1,02	+	1,21	+	1,04	+	0,73	-	0,89	-
P	0,82	-	1,36	+	0,59	-	1,36	+	1,38	+	1,03	+	1,30	+
Q	1,24	+	0,76	-	1,26	+	1,02	+	1,05	+	0,49	-	1,35	+
R,S,T,U	1,27	+	1,01	+	0,83	-	0,73	-	0,63	-	0,96	-	0,94	-

Sumber: BPS (diolah)

RPr: Rasio wilayah Pertumbuhan Referensi (Provinsi); RPs: Rasio wilayah Pertumbuhan Studi (Kabupaten/Kota)

Melalui perhitungan analisis MRP di kabupaten daerah tertinggal di Provinsi NTT, menunjukkan bahwa seluruh kabupaten daerah tertinggal di Provinsi NTT memiliki sektor yang tumbuh pesat, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Sektor-sektor ini merupakan sektor unggulan (nilai RPr (+), nilai RPs (+)) dan sektor potensial (nilai RPr (-), nilai RPs (+)) bagi perekonomian daerah. Dari 17 sektor pembentuk PDRB, secara rata-rata setiap kabupaten daerah tertinggal memiliki 3 sektor unggulan dan 4 sektor potensial (lihat Gambar 1).

**Gambar 1. Jumlah Sektor Unggulan dan Sektor Potensial Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2017-2019<sup>2</sup>**



Sumber: BPS (diolah)

<sup>2</sup> Ket: SB: Sumba Barat, ST: Sumba Timur, K: Kupang, TTS: Timor Tengah Selatan, B: Belu, A: Alor, L: Lembata, RN: Rote Ndao, STG: Sumba Tengah, SBD: Sumba Barat Daya, MT: Manggarai Timur, SR: Sabu Raijua, M: Malaka.

## Analisis Overlay

Analisis ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor ekonomi unggul maupun potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan dan kriteria kontribusi. Dalam analisis ini kriteria pertumbuhan dalam analisis MRP digunakan nilai RPs rata-rata selama periode 2017-2019, sedangkan untuk nilai kontribusi yang dipergunakan adalah nilai LQ rata-rata selama periode 2017-2019. Dengan mempertimbangkan kedua kriteria tersebut, penentuan kegiatan ekonomi yang unggul dan potensial dapat lebih akurat. Berdasarkan rekapitulasi hasil analisis diatas disimpulkan sektor-sektor ekonomi yang masuk dalam klasifikasi I, II, III dan IV tercantum dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 6. Hasil Analisis Overlay Sektor-Sektor Ekonomi Kabupaten Daerah Tertinggal di NTT Tahun 2017-2019**

Sektor	Kab. Sumba Barat Klasifikasi	Kab. Sumba Timur Klasifikasi	Kab. Kupang Klasifikasi	Kab. Timor Tgh Sel Klasifikasi	Kab. Belu Klasifikasi	Kab. Alor Klasifikasi	Kab. Lembata Klasifikasi
A	IV	II	I	I	II	I	I
B	II	IV	I	III	III	III	II
C	III	IV	III	IV	IV	III	IV
D	II	II	IV	IV	II	III	I
E	II	IV	IV	IV	II	IV	II
F	II	I	I	II	II	II	II
G	III	III	III	IV	III	III	IV
H	II	IV	III	IV	IV	I	IV
I	II	II	IV	IV	II	IV	II
J	IV	IV	IV	II	IV	IV	IV
K	I	II	IV	IV	III	III	IV
L	I	IV	IV	I	I	II	II
M,N	IV	II	II	II	II	III	IV
O	III	IV	IV	I	I	III	III
P	III	I	IV	II	I	IV	IV
Q	II	IV	II	IV	I	IV	IV
R,S,T,U	IV	III	II	IV	I	IV	IV

Sektor	Kab. Rote Ndao Klasifikasi	Kab. Sumba Tengah Klasifikasi	Kab. Sumba Barat Dy Klasifikasi	Kab. Manggarai Timur Klasifikasi	Kab. Sabu Raijua Klasifikasi	Kab. Malaka Klasifikasi
A	I	I	III	I	I	I
B	II	I	II	III	II	II
C	IV	II	IV	IV	III	III
D	IV	IV	II	II	II	II
E	IV	II	IV	II	II	II
F	IV	II	II	II	I	I
G	IV	II	I	I	III	IV
H	II	IV	II	IV	IV	III
I	IV	IV	II	IV	I	IV
J	II	IV	I	I	IV	IV
K	IV	IV	IV	IV	II	IV
L	II	I	IV	II	III	I
M,N	IV	II	II	IV	IV	IV
O	III	I	I	I	IV	III
P	I	IV	II	II	II	II
Q	III	II	II	I	IV	II
R,S,T,U	II	IV	IV	IV	IV	III

Sumber: BPS (diolah)

Klasifikasi I = sektor unggulan; klasifikasi II = sektor potensial yang sedang berkembang; klasifikasi III = sektor potensial yang cenderung menurun; dan klasifikasi IV = sektor tertinggal

## 5. Penutup

### 5.1. Kesimpulan

Dari uraian hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Dari rata-rata klasifikasi sektor berdasarkan Tipologi *Klassen* di kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihasilkan lima sektor maju dan tumbuh pesat, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Informasi dan Komunikasi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib. Sektor potensial yang sedang berkembang adalah Pertambangan dan Penggalian (Kab. Manggarai Timur dan Kab. Belu), Industri Pengolahan (Kab. Kupang), Informasi dan Komunikasi (Kab. Sumba Timur), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (Kab. Malaka), dan Jasa Lainnya (Kab. Sumba Timur). Sektor potensial yang sedang menurun di sebagian besar kabupaten daerah tertinggal di NTT, terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, *Real Estate*, Jasa Perusahaan, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. Sementara sektor tertinggal adalah sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Kab. Malaka, Kab. Sumba Timur, Kab. Rote Ndao, Kab. Timor Tengah Selatan, dan Kab. Kupang), Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Kupang, dan Kab. Sumba Timur), Transportasi dan Pergudangan (Kab. Lembata, Kab. Sumba Timur), dan Jasa Lainnya (Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Alor, Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Sumba Barat).

2. Dari rata-rata perhitungan *Location Quotient* (LQ) kabupaten daerah tertinggal di Provinsi NTT, proporsi sektor basis dan nonbasis berbeda-beda di tiap kabupaten. Kabupaten Sumba Barat memiliki 6 (enam) sektor basis dan 11 (sebelas) sektor nonbasis (lihat Tabel 4). Dari tabel pemeringkatan lapangan usaha yang menjadi sektor basis di kabupaten daerah tertinggal di Provinsi NTT, terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Sektor Pertambangan dan Penggalian, Dan Sektor *Real Estate* menjadi sektor basis terbesar di beberapa kabupaten. Sementara sektor nonbasis terbesar berasal dari sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Sektor Informasi dan Komunikasi, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi.
3. Berdasarkan gabungan perhitungan Tipologi *Klassen*, *Location Quotient* (LQ), Model Rasio Pertumbuhan, dan analisis *Overlay* (Tabel 8) maka dihasilkan sektor-sektor unggulan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor *Real Estate*; Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib; dan Sektor Konstruksi. Sementara sektor Konstruksi, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Pertambangan dan Penggalian, dan Jasa Perusahaan menjadi sektor potensial di beberapa kabupaten.

## 5.2. Saran

1. Kebijakan pembangunan daerah tertinggal di provinsi Nusa Tenggara Timur perlu diarahkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan (sektor maju/tumbuh pesat dan sektor basis) tanpa mengesampingkan pengembangan sektor-sektor lain (sektor potensial dan sektor tertinggal) sebagai pendukung/sektor penunjang.
2. Kebijakan pembangunan juga memperhatikan sektor-sektor yang menjadi basis dan berpotensi ekspor seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Perdagangan Besar; dan Sektor *Real Estate*.
3. Untuk pengembangan lebih jauh dalam menentukan kebijakan pembangunan yang tepat, maka diperlukan analisis terhadap produk-produk unggulan di masing-masing sektor di kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang tidak tercakup dalam penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin. (2004). *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Tinjauan Regional PDRB Kabupaten/Kota 2016-2020, Buku 5 Pulau Nusa Tenggara, Maluku dan Papua*. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Indonesia 2016-2020*. Jakarta
- Halawa, Fenti Trinop Putra. (2014). *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kabupaten/Kota di Kepulauan Nias*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019
- Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020-2024,
- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Putra, Edo Pramana. Karmiati (2018). *Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Sektor Unggulan Di Kabupaten Gowa*. Jurnal Mega Aktiva. Volume 7, Nomor 2, Agustus 2018
- Rajab, Abdul. Rusli. (2019). *Penentuan Sektor-Sektor Unggulan Yang Ada Pada Kabupaten Takalar Melalui Analisis Tipologi Klassen*. GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan. Volume 1, No. 1, 16-38, 2019
- Siti Rahayu, Endang (2010). *Aplikasi Tipologi Klassen Pada Strategi Pengembangan Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan Di Kabupaten Boyolali*. Journal of Rural and Development. Volume I No. 2 Agustus 2010.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media Cetakan Pertama: Padang.

- Tutupoho, Ali (2019). *Analisis Sektor Basis Dan Sektor Non Basis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota)*. Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi. Vol. XIII, No. 1, Mei 2019.
- Yusuf, Maulana. (1999). *Model Rasio Pertumbuhan (MRP) sebagai Salah Satu Alat Analisis Alternatif dalam Perencanaan Wilayah dan Kota*. Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLVIII Nomor 2. Jakarta.